

TAJUK RENCANA

Segera Wujudkan 'Herd Immunity'

DIY harus lebih memperketat mobilitas masyarakat agar kasus Covid-19 segera menurun. Sebab, meski PPKM level 4 sudah diperpanjang, angka kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi. Artinya harus ada langkah strategis dan efektif untuk menekan penyebaran virus tersebut. Sekadar menyebut contoh DKI Jakarta, yang juga diterapkan PPKM level 4, mobilitas masyarakatnya sudah melandai, sehingga jumlah kasusnya pun menurun.

Tentu Pemda DIY harus melakukan evaluasi mengapa angka kasus Covid-19 di DIY masih tinggi, sementara PPKM sudah diperpanjang, paling tidak hingga 16 Agustus hari ini. Apakah ini disebabkan masyarakat yang kurang disiplin menerapkan 5 M, atau ada sebab lain? Sebagaimana disentil epidemiolog dari UGM Bayu Satria Wiratama, kalau pembatasan mobilitas masyarakat dan pelaksanaan 3T, yakni testing, tracing dan treatment tidak jalan atau hanya setengah-setengah, maka hasilnya juga tidak sesuai yang diharapkan (KR 15/8).

Kita sepatutnya mendorong kesadaran masyarakat untuk selalu menerapkan 5 M dalam kehidupan keseharian, namun mestinya juga diimbangi pelaksanaan 3T dari pemerintah. Sebab, bila keduanya tidak seimbang, dikhawatirkan upaya yang selama ini kita lakukan untuk menekan laju penyebaran Covid-19 menjadi tidak efektif.

Apalagi, institusi pelayanan publik kini telah menyaratkan kartu vaksin bagi konsumen. Kebijakan itu menjadi kontraproduktif bila ternyata vaksinasi belum merata. Kalau memang hendak menyaratkan kartu vaksin, mestinya vaksinasi untuk masyarakat umum harus digenot se-

hingga memenuhi target. Sejumlah daerah yang menerapkan PPKM level 4, seperti DKI, kini telah memulai uji coba membuka mal atau pusat perbelanjaan, namun dengan syarat pengunjung harus mengantongi kartu vaksin, minimal dosis pertama.

Kalau DIY hendak menerapkan kebijakan tersebut, tentu harus memperhatikan asas keadilan dan pemerataan. Mereka yang secara medis belum bisa divaksin, bukan karena menolak, harus dipertakutkan secara adil. Artinya, kebijakan yang menyaratkan kartu vaksin tak boleh digeneralisasi, melainkan tetap memperhatikan asas keadilan dan proporsionalitas.

Kita juga mendorong agar pemerintah daerah gencar melakukan testing guna mewujudkan herd immunity atau kekebalan komunal. Untuk mewujudkan hal itu, selain harus memastikan ketersediaan vaksin, juga SDM vaksinator, misalnya dengan memobilisasi tenaga medis maupun mereka yang secara kemampuan memenuhi syarat untuk menjadi vaksinator. Percepatan ini harus dilakukan guna mencapai herd immunity.

Sementara terkait tuntutan pedagang kecil, baik kakilima, pedagang pasar, pelaku usaha kecil maupun pekerja sektor informal yang meminta jaminan hidup (jadup) tunai dari pemerintah karena terdampak pandemi patut didengarkan. Namun bukan berarti serta merta langsung dipenuhi. Pasalnya, saat ini sudah cukup banyak program bantuan sosial (bansos) yang digulirkan ke daerah untuk masyarakat terdampak pandemi, dengan berbagai sebutan seperti PKH, BLT, BSU dan sebagainya. Paling tidak harus ada verifikasi data agar bantuan tepat sasaran dan tidak dobel. □

Kisah Kemerdekaan dan Keistimewaan Yogyakarta

MANAKALA menapaki jejak artefak, sedari awal kelahiran Republik Indonesia, hingga menginjak titian ketujuh puluh enam Indonesia merdeka, Yogyakarta adalah wilayah yang punya peran istimewa. Tentunya tanpa menampik *sengkuyung*-nya daerah-daerah lain. Tak luput dikisahkan dalam sejarah Nusantara, Yogyakarta kerap *urun rembug*, mengobarkan api perjuangan merawat kemerdekaan Indonesia pusaka.

Sultan Kraton Ngayogyakarta dan Adipati Pakualaman beserta segenap rakyatnya kompak begitu bergelora dan rela. Sekalipun harus menjadi pagar betis ataupun benteng menjaga agar pohon kemerdekaan tetap kokoh subur menjulang rimbun. Nama Yogyakarta banyak menghiasi dalam lika-liku kisah perjuangan NKRI.

Indonesia secara sah merdeka dengan diploklamirkannya teks Proklamasi Soekarno-Hatta tepat 17 Agustus 1945 di Jalan Pegangsaan Timur No 56 Jakarta Pusat pukul 10.00. Disaksikan jutaan pasang mata riuh sorak bergemuruh, Indonesia "Merdeka! Merdeka! Merdeka!"

Pengorbanan Total

Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengku Buwono IX dan Paku Alam VIII pun langsung mengirim ucapan selamat atas kemerdekaan itu. Dengan ketulusan jiwa kegarannya secara arif bijaksana pada 5 September 1945 Sultan dan juga Pakualaman menyatakan secara sungguh-sungguh untuk bergabung dengan NKRI. Sebuah sikap kerelaan dan pengorbanan yang teramat luar biasa dari lubuk hati seorang pemimpin yang istimewa. Padahal kala itu NKRI bisa dikatakan masih terseok-seok menghadapi darurat militer mempertahankan kemerdekaan.

Pengorbanan Yogyakarta tidaklah setengah-setengah, melainkan totalitas. Terbukti, kala Belanda yang memang masih enggan serta belum jua mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia

Suwanto

tilik balik ke Indonesia. Membonceng Sekutu, Belanda sukses menduduki Ibu Kota Jakarta, 29 September 1945. Situasi ibu kota mencekam. Jakarta sebagai Ibu Kota NKRI amat genting terancam jauh dari kata aman.

Ngarso Dalem, Sultan HB IX tidak tinggal diam, sekali lagi dengan rela dan insting kenegaraannya 2 Januari 1946 mengirim kurir ke ibu dan memberi saran agar Ibu Kota NKRI diboyong ke



KR-JOKO SANTOSO

Yogyakarta. Dengan penuh rasa haru biru tawaran itu akhirnya diterima oleh Sukarno pada 4 Januari 1946.

Penawaran kepindahan ibu kota ke Yogyakarta bukanlah atas dasar ajang gagah-gagahan. Namun, memang dilandasi rasa empati tulus. Yogyakarta sudah mempersiapkan dengan matang. Seperti diungkapkan Soetaryo (2011) Bung Karno memilih Yogyakarta tidak main-main. Yogyakarta ialah daerah yang paling siap, baik dari sisi politik, ekonomi, maupun aspek keamanannya.

Bahkan banyak kisah haru dan peluh dalam episode Ibu Kota di Yogyakarta

sebagaimana dikisahkan oleh Heri Priyatmoko (2020) yang mana kala itu suasana Kota Gudeg dan Kota Bengawan awalnya *nguler kambang* dan *nglaras*, tetiba riuh ramai. Para pemangku kota kuwalahan menyambut dan menampung dari Jakarta ke Yogyakarta. Mereka berduyun-duyun naik *sepur* sebagai transportasi kala *boiyongan* ke Yogyakarta.

Suluh Keistimewaan

Suluh keistimewaan semakin padang terang kala Yogyakarta menjadi saksi atas dikukuhkannya Presiden Soekarno dan Mohammad Hatta di Siti Hinggil Kraton Yogyakarta pada 17 Desember 1949. Seusai dilantik, tentu sebagai suatu negara yang berdaulat, NKRI butuh ana dalam menjalankan roda pemerintahannya. Sekali lagi pengorbanan Sultan HB IX dalam hal ini sungguh teramat luar biasa istimewa. Kanjeng Sultan menyerahkan dana sebanyak 6 juta gulden untuk menjalankan pemerintahan NKRI. Mengingat kala itu kondisi keuangan Pemerintah Indonesia sedang krisis.

Mengharukan, pengorbanan Yogyakarta demikian Istimewa. Yogyakarta terbukti dengan senyata-nyatanya menjadi saksi sejarah kemerdekaan Indonesia. Seperti wejangan Sultan HB X: "Yogya adalah untuk Indonesia, bahwa menjadi Yogya adalah menjadi Indonesia". □

*) *Suwanto*, peneliti pada Pascasarjana UNY

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkannya fotocopy identitas. Terimakasih.

Ekonomi - Konservasi Saat Pandemi

TANGGAL 10 Agustus lalu kita merayakan Hari Konservasi Alam Nasional (HKAN) dengan tema *Bhavana Satya Alam Budaya Nusantara* yang bermakna 'Memupuk Kecintaan Pada Alam dan Budaya Nusantara'. HKAN ke-31 dilaksanakan di Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang dan Pantai Lasiana Kota Kupang.

Tema HKAN tahun ini mirip dengan tema tahun 2018, yakni 'Harmonisasi Alam dan Budaya'. Di saat pandemi Covid 19 ini akan lebih baik tema yang diangkat adalah solusi riil dan praktis masyarakat untuk ke luar dari krisis ekonomi akibat pandemi Covid. Hubungan ekonomi dan konservasi di masyarakat desa yang masih menggantungkan hidupnya pada alam sangat berkaitan erat.

Pencurian Burung

Contoh riil adalah kasus penganaman puluhan ekor burung berkicau dari tangan 2 orang penangkap burung di hutan lereng Gunung Arjuna oleh tim gabungan dari Pro Fauna Indonesia dan Tahura R Soerjo pada tanggal 1 Juli 2021 (Pro Fauna Indonesia, 2021). Kasus seperti ini cukup sering terjadi di kawasan konservasi seperti Taman Nasional, Cagar Alam, dan Suaka Margasatwa, dan alasan utama pelaku adalah faktor ekonomi. Selain kasus pencurian burung di hutan negara juga ada pengambilan kayu ketika petugas sedang *work from home*.

Saat bencana pandemi harusnya negara hadir agar permasalahan ekonomi rakyat yang hidup berdampingan dengan kawasan konservasi juga teratasi. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang bertujuan untuk melindungi habitat dan tempat hidup berbagai jenis makhluk hidup dari kerusakan.

Tentunya, di sekitar kawasan tersebut terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang bermukim. Maka dari

Arif Suliantono

itu, diperlukan pemberdayaan masyarakat untuk memberikan pengetahuan tentang pelestarian kawasan konservasi dan kemandirian masyarakat. Ada 4.500 desa di sekitar kawasan konservasi, tentu ada yang terdampak ekonomi akibat pandemi covid.

Konservasi di era pandemik harusnya memperhatikan tiga hal yakni: pandemi itu sendiri, bencana hidrometeorologi dan teknologi digital (Susilo, 2021). Penanganan bencana pandemi juga harus memperhatikan dampak ekonomi. Masyarakat yang kehilangan mata pencaharian akibat pandemi akan cenderung mengambil dari hutan untuk mencukupi kebutuhan pokoknya.

Jika ini dibiarkan akan terjadi kerusakan hutan yang berdampak pada bencana hidrometeorologi. Disini tidak hanya berhenti pada masyarakat atau desa tangguh bencana. Teknologi digital harus menjadi salah satu solusi. Pemberdayaan masyarakat di desa konservasi atau desa penyangga kawasan konservasi harus menyentuh pada dunia digital.

Negara dalam hal ini diwakili KLHK di tingkat tapak turun tangan ikut menangani produk pertanian desa penyangga kawasan konservasi. Salah satu contohnya adalah akibat pandemi kelompok petani di desa penyangga Taman Nasional Gunung Merapi (TNGM) mengalami kesulitan dalam pemasaran produk pertaniannya seperti madu, kopi, dan lain-lain.

Pasar Digital

Permasalahan ini dapat teratasi dengan adanya pemasaran

melalui teknologi digital. Kalau perlu KLHK membuat suatu *platform* aplikasi pasar digital produk dari desa penyangga kawasan konservasi. Produk herbal seperti jamu dan madu dari desa penyangga selama pandemi adalah salah satu contoh yang cukup laku di pasar digital.

Sebenarnya budaya yang terkait dalam HKAN adalah budaya *srawung* atau silaturahmi untuk menanyakan kabar seseorang. Petugas penjaga hutan selama pandemi harus lebih *intens* untuk *srawung* ke masyarakat, agar dapat menggali permasalahan yang ada di desa penyangga kawasan konservasi. Data hasil *srawung* kemudian diolah untuk dicari solusinya secara bersama-sama. Warga-pun akan *pekewuh* atau enggan melakukan pencurian di hutan jika sudah akrab dengan petugas. □

*) *Arif Suliantono MAgri MSI*, Koordinator Ahli Perubahan Iklim Kehutanan (APIK) Indonesia Region Jawa & pegiat ekowisata desa

Pojok KR

Pesan Presiden, pramuka harus jadi pencegah Covid-19.

-- Perlu diterjunkan di setiap RT/RW.

Terdampak PPKM, pedagang DIY menuntut jadup.

-- Tak cukup hanya menuntut, tapi juga taati prokes.

Airlangga ingatkan pasien Covid-19 dapat layanan kesehatan.

- Yang tidak mendapatkan, jangan hanya diam.

Berats

PIKIRAN PEMBACA

Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik

Naskah dikirim Email atau WA

pikiranpembaca@gmail.com

0895-6394-11000

dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Merah Putih Pesawat Kepresidenan

MENYAMBUT HUT ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia, banyak wilayah di Indonesia yang berhiis diri untuk memeriahkan peringatan tersebut. Tidak ketinggalan dengan pesawat kepresidenan Republik Indonesia turut berhiis diri.

Pesawat kepresidenan dengan jenis Boeing Business Jet 2 yang dibeli tahun 2014 dengan harga 89,6 juta Dollar Amerika atau sekitar Rp 847 miliar tersebut, berubah warna dari biru muda menjadi merah dan putih. Sebelumnya, warna asli pesawat yang dibeli pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut adalah biru muda karena dinilai senada dengan warna khas milik TNI Angkatan Udara.

Perubahan warna cat pesawat kepresidenan tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak tahun 2019. Namun, karena belum memasuki jadwal perawatan rutin, maka penggantian pesawat tersebut ditunda hingga tahun 2021. Berapa anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengecat pesawat kepresidenan tersebut?

Alvin Lie, pengamat penerbangan, dalam akun media sosialnya menuliskan biaya penggantian ulang pesawat setara B737-800 berkisar antara 100.000 sampai 150.000 Dollar Amerika atau setara dengan Rp 1.4 miliar sampai dengan Rp 2.1 miliar. Dengan besaran biaya tersebut, pemerintah dianggap kurang sensitif terhadap penderitaan masyarakat akibat pandemi yang masih terjadi. Lalu, bagaimana jika anggaran sebesar Rp 2 miliar tersebut dialokasikan untuk belanja vaksin untuk membantu percepatan terben-

tuknya kekebalan kelompok?

Direktur Anggaran Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Keuangan, Purwanto, dilansir dari Antara, menyebutkan realisasi belanja vaksin sampai 31 Juli 2021 telah mencapai Rp 11.72 triliun untuk 65,79 juta dosis vaksin. Jika dihitung secara kasar tanpa memperhatikan harga dari masing-masing produsen vaksin, diperoleh harga Rp 180.000 per dosis vaksin. Dan jika anggaran penggantian badan pesawat kepresidenan sebesar Rp 2 miliar dialokasikan untuk belanja vaksin, maka dapat untuk membeli sekitar 11 ribu dosis vaksin.

Kedua pilihan tersebut sama-sama baiknya. Menambah jumlah dosis vaksinasi gratis atau mengganti warna badan pesawat dengan warna merah putih dengan anggaran Rp 2 miliar. Keduanya juga sama-sama penting, vaksinasi untuk mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok, perawatan rutin pesawat kepresidenan untuk keamanan penerbangan kepala negara.

Terlepas dari polemik biaya yang dikeluarkan pemerintah, perubahan warna badan pesawat kepresidenan ini layak diapresiasi. Warna merah dan putih, telah menjadi warna kebanggaan bangsa. Kelak jika kegiatan kepresidenan di berbagai forum nasional dan internasional kembali kepada pertemuan tatap muka, akan menjadi satu kebanggaan tersendiri ketika melihat pesawat kepresidenan Republik Indonesia mengangkasa dengan warna merah putih. □

*) *Hario Prabowo, Mlati Tegal RT 05 / RW 20, Sendangadi, Mlati, Sleman.*

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Penasihat:** Drs HM Idham Samawi. **Komisaris Utama:** Prof Dr Inajati Adrisjanti. **Direktur Utama:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Direktur Pemasaran:** Fajar Kusumawardhani SE. **Direktur Keuangan:** Imam Satriadi SH. **Direktur Umum:** Yurika Nugroho Samawi SE MM MSC. **Direktur Produksi:** Bakoro Jati Prabowo SSoS.

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percepatan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab peretakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Semarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.

Kedaulatan Rakyat

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussenada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankrkyk@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarang... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00 /mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%